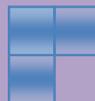




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Balangan

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani Km. 3,5 Paringin Telp. (0256) 2028395 Fax. (0526) 2028248
Paringin Selatan 71662
Email : Inspektoratblg@gmail.com



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahkiim,

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024. Dengan tersusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat T.A 2024 diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan serta memudahkan dalam melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Tugas.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/Pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran di Inspektorat guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Pariagin, Juli 2023
Inspektur,

Drs. Ura Nur Iskandar, MM
Pemboina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	32
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V. PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 dan bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Renja Inspektorat terkait dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Balangan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan misi Bupati Balangan ke IV yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara serta penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Semua Dokumen Perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari renstra skpd yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-rahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) didasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16)
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
22. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Balangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Balangan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini diantaranya adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Inspektorat Kabupaten Balangan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Balangan.
2. Sebagai pedoman Inspektorat Kabupaten Balangan untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi;
3. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2022. Evaluasi Renja 2022 terhadap Program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Inspektorat Kabupaten Balangan, Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel TC .29
Evaluasi Hasil renja Inspektorat Kabupaten Balangan
Sampai dengan tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	UNSUBUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN									
1 01	INSPEKTORAT DAERAH									
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	74 (BB)	BB (73,03)	74 (BB)	76,02 (BB)	107	73 (BB)	73,95 BB	99
		Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	0	100	100	100	100	50	50
1 01 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100	0	100	100	100	50	50	50
1 01 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	0	2	2	100	1	50	25
1 01 01 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	0	4	2	50	4	2	25

6	01	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	0	100	100	100	100	50	50
6	01	01	2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	3805	0	630	630	100	630	270	23
6	01	01	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0	100	100	100	100	50	50
6	01	01	2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14	0	3	3	100	4	1	28
6	01	01	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240	0	25	25	140	54	30	22
6	01	01	2.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	0	0	0	0	20	74	67
6	01	01	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100	0	100	100	100	100	50	50
6	01	01	2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	0	4	4	100	12	3	24
6	01	01	2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	6	41
6	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	720	120	120	120	100	120	36	21
6	01	01	2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325	0	60	60	100	60	65	38
6	01	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100	0	100	100	100	100	100	50
6	01	01		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan operasional	6	0	2	2	100	0	0	33
6	01	01		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	19	0	3	3	100	4	1	21

6	01	01	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72	12	12	12	100	12	6	41
6	01	01	2.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	12	12	12	100	12	6	41
6	01	01	2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	100	100	100	12	6	41
6	01	01	2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	6	41
6	01	01	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	72	12	12	12	100	12	6	41
6	01	01	2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222	0	37	37	100	37	52	40
6	01	01	2.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Dipelihara	6	0	1	1	100	1	2	33
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85	89	75	92	122	78	82	96
6	01	02	01	Pengawasan Internal	% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	70	50	50	66	132	55	24	80
					Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	80	43	65	40	61	68	0	76
6	01	02	2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198	40	33	33	100	33	42	56
6	01	02	2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	50	0	10	8	80	10	2	56
6	01	02	2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12	2	2	2	100	2	2	33
6	01	02	2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	1	1	1	100	1	1	50
6	01	02	2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36	4	3	2	66	6	0	5
6	01	02	2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	0	4	4	100	4	0	16

6	01	02	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD/Desa di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal;	62	83	50	86	172	56	0	138
					Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	50	50
6	01	02	2.0201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang	12	2	2	2	100	2	1	41
6	01	02	2.0202	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	438	91	73	116	158	73	192	43
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK : 6 - WBBM : 6	- WBK : 0 - WBBM : 0	- WBK : 2 - WBBM : 2	- WBK : 0 - WBBM : 0	0	- WBK : 3 - WBBM : 3	0	0
					Level Maturitas SPIP	3 (3,2)	3 (3,2)	3 (3,023)	3 (3,023)	100	Level 3 (3,1)	0	96
					Indeks Integritas	82	76,52	78	75,36	96	80	0	91
					Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	100	3	0	0
6	01	03	02	Pendampingan dan Asistensi	prentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100	100	100	100	100	100	0	0
					Nilai PMPRB	75	75,63	70	72,48	103	74	0	0
					Persentase Pencapaian Indikator MCP	79	83	75	86	114	78	46	58
					Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	WBK : 7 WBBM : 7	WBBM : 2 WBK : 1	WBBM : 3 WBK : 3	WBBM : 3 WBK : 0	100	WBBM : 4 WBK : 4	WBBM : 6 WBK : 0	42
6	01	03	2.0301	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	180	30	30	0	0	32	0	16
6	01	03	2.0302	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25	10	12	10	83	32	0	15
6	01	03	2.0303	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	94	83	90	86	95	3	1	22
6	01	03	2.0304	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	30	60	60	100	32	5	18

Berdasarkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 yang disampaikan diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) indikator program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk indikator jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM tidak memenuhi target kinerja yaitu pada tahun 2022 target WBK 2 dan WBBM 2 realisasi WBK 0 dan WBBM 0, dimana pada tahun 2022 terdapat 5 unit kerja yang diusulkan menjadi penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Kabupaten Balangan Nomor 700/123/LHP/Inspektrat-BLG/2022 tanggal 5 juli 2022 bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Balangan telah mengusulkan 5 (lima) unit/satuan kerja untuk menjadi Zona Integritas yaitu RSUD; Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. 3 (tiga) unit/satuan kerja memenuhi syarat untuk diajukan menjadi WBK dan 2 (dua) unit/satuan kerja belum memenuhi syarat untuk diajukan menjadi WBK karena tindak lanjut hasil pengawasan belum 100% selesai ditindaklanjuti.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Balangan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Inspektorat menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan administrasi inspektorat ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja Sasaran Strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Indeks Integritas	78	75,36	96
		Level maturitas SPIP	Level 3 (3,023)	Level 3 (3,023)	100
		Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	WBK 2 WBBM 2	WBK 0 WBBM 0	0
	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	75	92	122

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikn Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Indeks Integritas

Nilai Indeks Integritas Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah 75,36 dari target 78 atau capaian 96%. Berdasarkan rekomendasi dari KPK untuk Kabupaten Balangan agar dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan Korupsi dalam rangka meningkatkan integritas adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan, menginovasikan dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawai yang bertindak tidak sesuai atura;
- b. Intensifikasi, sosialisasi dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan, (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
 1. Kebijakan, regulasi dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi diinstansi
 2. Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi
 3. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi
 4. Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindaklanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal
- c. Intensifikasi, sosialisasi serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan;
- d. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut:
 1. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Internalisasi terkait peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku
 3. Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa
 4. Mengintensifkan penggunaan vendor management system
 5. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan
 6. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Intensifikasi, sosialisasi dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM diseluruh tingkat jabatan di instansi

- f. Intensifikasi, sosialisasi dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
1. Penegakan saknsi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya
 2. Adanya larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi, disertai contoh dari pimpinan
 3. Kebijakan, regulasi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi
 4. Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan
 5. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat dan setelah pimpinan menduduki jabatan
- g. Perbaiki pada upaya internalisasi peningkatan kesadaran dan perilaku melaporkan LHKPN melalui:
1. Sosialisasi, kampanye dan pelatihan secara periodik serta berkelanjutan
 2. Memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor, sanksi dll
 3. Mengaitkan pelaporan dengan syarat untuk mendapatkan hak (promosi, insentif, dll)
 4. Memberikan hukuman sosial/administrasi kepada yang tidak melapor
- h. Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik
- i. Perbaiki mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan dengan memastikan berbagai hal berikut:
1. Penyederhanaan proses bisnis yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan
 2. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan
 3. Melakukan evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan

2. Level maturitas SPIP

Berdasarkan dari Laporan Hasil QA (Quality Assurance) oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan nomor LQA-416/PW16/3/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,023, dimana target pada tahun 2021 level 3 (3,023) atau capaian 100 % dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022 masih menggunakan hasil penilaian tahun 2018 karena sampai dengan laporan ini disusun belum dilaksanakan lagi penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Akan tetapi pada tahun 2023 Kabupaten Balangan telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP berdasarkan Penilaian mandiri (PM) sebesar “4.1757” dan berdasarkan Penjaminan Kualitas (PK) sebesar “4,0279”.

3. Level Kapabilitas APIP

Pada tahun 2022 target Level kapabilitas APIP level 3 realisasi level 3 dengan capaian 100% atau dalam kategori Sangat Tinggi. Berdasarkan Hasil Laporan QA BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan nomor SP-267/D3/04/2020 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Balangan tanggal 5 Maret 2020 menyatakan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Balangan telah berada di level 3 untuk semua elemen. Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Balangan telah melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP melalui aplikasi BPKP <https://apip.bpkp.go.id/newapip/monitoring> dengan hasil level 3.

4. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Pada tahun 2022 Indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM target WBK 2 WBBM 2, realisasi WBK 0 WBBM 0 capaian 0%. Capaian penilaian

indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam kategori Sangat Rendah.

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Kabupaten Balangan Nomor 700/123/LHP/Inspektrat-BLG/2022 tanggal 5 juli 2022 bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Balangan telah mengusulkan 5 (lima) unit/satuan kerja untuk menjadi Zona Integritas yaitu RSUD; Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pendidkan dan Kebudayaan; Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. 3 (tiga) unit/satuan kerja memenuhi syarat untuk diajukan menjadi WBK dan 2 (dua) unit/satuan kerja belum memenuhi syarat untuk diajukan menjadi WBK karena tindak lanjut hasil pengawasan belum 100% selesai ditindaklanjuti.

5. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pada Tahun 2022 untuk Indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan realisasi sebesar 92% dari target tahun 2022 sebesar 75% atau dengan capaian 122% dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun 2021 adalah sebesar 119% atau mengalami peningkatan sebesar 3%.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP), kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat propinsi dan kegiatan Tindak Lanjut Hasil pengawasan Ekstrenal (BPK RI).

Capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Sampai Dengan Tahun 2022

No	Sumber Pemeriksaan	Jumlah temuan Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
1	BPK RI	808	749	53	0	6

2	Inspektorat Propinsi	11	11	0	0	0
3	APIP	505	462	0	43	0
Total		1324	1222	53	43	6
Capaian		92%				

Data : Tim Monitoring dan Evaluasi Inspektorat kabupaten Balangan

Berdasarkan Berita acara rekonsiliasi data tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah Kabupaten Balangan yang dilaksanakan pada hari senin sd jumat tanggal 19 sd 23 Desember 2022 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan capaian Kabupaten Balangan sebesar 92% menduduki peringkat ke 2 (dua) se-Kalimantan Selatan dimana peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sampai dengan tahun 2022 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan sebanyak 808 dan sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 749 rekomendasi, sementara 53 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh SKPD akan tetapi belum sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. 6 (enam) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena rekomendasinya tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Capaian penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi sebesar 100%, dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi nomor 700/014/IBW.2/IP/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Terdapat 11 (sebelas) rekomendasi dan sudah selesai ditindaklanjuti.

Capaian penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP sebesar 91% dari jumlah rekomendasi sebanyak 505 dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 462 rekomendasi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur perangkat daerah yang melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dihadapkan pada beberapa isu strategis, baik isu yang dihadapi secara nasional, maupun pada tataran regional/lokal.

Dari hasil inventarisasi permasalahan strategis, ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian:

1. Pencegahan dan pengendalian korupsi/kecurangan
2. Kompetensi APIP
3. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan baik pemeriksaan eksternal maupun internal

Isu-isu strategis diatas memerlukan perhatian agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang bisa mengganggu pencapaian tujuanyang ingin dicapai Inspektorat yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dari KKN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Inspektorat Kabupaten Balangan termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Balangan yaitu dalam pencapaian misi Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Balangan dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenlatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran. Adapaun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 pada tabel TC-31 sebagai berikut :

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BALANGAN

SKPD : Inspektorat

NO	Rancangan Awal RKPD SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	73 (BB)	12,066,895,911	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	72 (BB)	12,066,895,911	-
			Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100				Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100%	67,778,800	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100%	67,778,800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,495,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,495,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	65,283,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	65,283,800	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Balangan	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	7,693,301,911	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Balangan	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	7,693,301,911	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Balangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang/bulan	7,693,301,911	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Balangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang/bulan	7,693,301,911	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Balangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1,873,014,100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Balangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1,873,014,100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	119,059,100	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	119,059,100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Balangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 pegawai	669,255,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Balangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 pegawai	669,255,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 pegawai	1,084,700,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 pegawai	1,084,700,000	

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Balangan	prosentase pemenuhan administrasi	100%	1,380,846,800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Balangan	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100%	1,380,846,800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 paket	251,792,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	251,792,700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	87,236,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	87,236,100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	47,192,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 dokumen	47,192,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	994,626,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	994,626,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	438,321,200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	438,321,200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,100,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205,224,900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205,224,900
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226,996,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226,996,300
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 waktu	613,633,100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	613,633,100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	497,223,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	497,223,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Dipelihara	1 unit	116,410,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Dipelihara	1 unit	116,410,100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab Balangan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	80%	3,548,247,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab Balangan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	80%	3,548,247,000
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab Balangan	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	33 SKPD	2,831,157,000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab Balangan	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	33 SKPD	2,831,157,000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33 Laporan	289,700,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33 Laporan	289,700,000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	580,177,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	580,177,000

	Reviu Laporan Kinerja	Kab Balangan	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	52,500,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab Balangan	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	52,500,000		
	Reviu Laporan Keuangan	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	62,190,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	62,190,000		
	Pengawasan Desa	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6 Laporan	1,494,990,000	Pengawasan Desa	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6 Laporan	1,494,990,000		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	4 Dokumen	351,600,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	4 Dokumen	351,600,000		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Balangan	Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai	75 rekomendasi	717,090,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Balangan	Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti	75 rekomendasi	717,090,000		
Prosentase pagaduan masyarakat yang ditangani				100%					Prosentase pagaduan masyarakat yang ditangani		100%	
Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi				Level 4 (4,0279)					Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		Level 4 (4,0279)	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Laporan	42,990,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Balangan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Laporan	42,990,000		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan tepat waktu	73 Laporan	674,100,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan tepat waktu	73 Laporan	674,100,000		
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab Balangan	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK : 4 - WBBM : 4	2,122,367,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab Balangan	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK : 4 - WBBM : 4	2,122,367,000		
				Level Maturitas SPIP					Level 3 (3,1)		Level Maturitas SPIP	3 (3,2)
				Indeks Integritas					80		Indeks Integritas	82
				Level kapabilitas APIP					Level 3		Level kapabilitas APIP	3
	Pendampingan dan Asistensi	Kab Balangan	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	WBK : 5 75	2,122,367,000	Pendampingan dan Asistensi	Kab Balangan	prentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	WBK : 5 75	2,122,367,000		
			Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	100%				Presentase Pencapaian Indikator MCP	100%			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 perangkat daerah	177,575,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	177,575,000		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Balangan	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah	302,330,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Balangan	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	302,330,000		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Balangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	1,082,523,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kab Balangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	1,082,523,000		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 Perangkat Daerah	559,939,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	21 Perangkat Daerah	559,939,000		
Jumlah Pagu					17,737,509,911							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat, namun berdasarkan tugas dan fungsinya selaku Instansi Pengawas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu :

- a) Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b) Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.
- c) Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari Masyarakat.

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

NO	Indikator	SPM	IKU/IKK	NSPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Level Maturitas SPIP				Level 3 (3,023)	Level 3 (3,023)	3 (3,05)	3 (3,1)	Level 3 (3,023)	Level 3 (3,023)	Level 3 (3.5974)	Level 3 (3.5974)	Angka berdasarkan hasil PK Maturitas SPIP oleh
2	Level Kapabilitas APIP				Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Secara rinci 8 (delapan) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan sasaran system jaminan social, Modernisasi Pertanian dan Pemerataan Pembangunan yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023)→0-1% (2024)
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%

c. Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107

2. Fokus Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan) dengan sasaran system kesehatan dan Pendidikan (system Pendidikan dan Pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14%(2024)
- b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
- c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
- d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
- e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%
- f. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun
- g. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen

3. Fokus Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dengan sasaran penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%
- b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%
- c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang
- d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%

4. Fokus Mendorong pemulihan dunia usaha dengan sasaran revitalisasi parawisata dan pengembangan UMKM yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
- b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %
- c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar o Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
- d. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun

5. Fokus Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dengan sasaran industrialisasi, riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %
 - c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80 o Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%
 - e. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%

6. Fokus Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim dengan sasaran ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
 - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%

7. Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi dengan sasaran Penyediaan air bersih dan sanitasi, Infrastruktur Digital dan Infrastruktur Konektivitas , yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
 - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
 - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 50%

8. Fokus Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan sasaran fasilitas dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
4. Rasio Gini sebesar 0,375- 0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105-107

3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024

Pada tahun ini Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Berdasarkan tema RKPD tersebut ditetapkan Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk perencanaan di tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura berbasis korporasi
 - b. Pembangunan Rumah Kemasan
 - c. Pengembangan Geopark
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul & Berdaya Saing. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemberian makanan tambahan
 - b. Peremajaan tanaman karet

3. Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Mendukung Konektivitas IKN dan Food Estate
 - b. Jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin
 - c. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Air Minum SPAM
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
 - e. Peningkatan & Rehabilitasi Daerah Irigasi
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
 - a. Pembangunan Gedung Rumah Sakit
 - b. Penyediaan Alat Kesehatan
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif
 - b. Revolusi Hijau (Seluas 45.00 Ha)

3.1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2024

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta isu-isu strategis, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2027 adalah ***“Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan”***.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 7 (tujuh) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan Dan Sarana Prasarana Transportasi Darat dalam mendukung konektivitas wilayah penyokong Ibu Kota Negara (IKN)
 - b. Pemenuhan PJU, Rambu Lalu Lintas, Warning Light, Marka Jalan, Lampu Merah, CCTV Dan Fasilitas Keselamatan Jalan Lainnya
 - c. Pembangunan Terminal Tipe C
 - d. Pemenuhan Moda Transportasi Sekolah Dan Transportasi Umum Untuk Peningkatan Trayek Antar Kecamatan
 - e. Penataan Kota, Legalisasi Review Perda RTRW Dan RDTR Kota Paringin
 - f. Pintu Gerbang Batas Kabupaten Dan Tugu Simpang Empat Bundaran Paringin
 - g. Penataan Median Mesjid Al Akbar
 - h. Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pengairan Dan Irigasi (Tuntas Fungsi DI Pitap)
 - i. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah (gedung budaya dan MPP)
 - j. Rehabilitasi Mesjid Al-Akbar
 - k. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (bedah rumah)
 - l. Pemenuhan akses Sanitasi dan Air Bersih
 - m. Penuntasan permukiman kumuh dan peningkatan drainase perkotaan
 - n. Pemenuhan PSU (jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan, sarana proteksi kebakaran, dll) baik perumahan swadaya maupun formal
 - o. Pembangunan islamic center dan istana anak yatim (lanjutan)
 - p. Pemenuhan layanan internet (pemunahan blank spot)
 - q. Peningkatan Pengelolaan Persampahan (TPS3R, Pusat Daur Ulang dan Bank sampah)
 - r. Pembangunan dan peningkatan kualitas RTH (RTH Pemerintah, RTH Mesjid Al Akbar, RTH Publik) dan Kebun Raya
2. Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pembangunan JUT, Jalan Produksi

- b. Bantuan pupuk, obat, semprotan dan bibit (pertanian, peternakan dan perikanan)
- c. Bantuan hand traktor, perontok padi
- d. Peningkatan penyediaan bibit (pertanian, perkebunan dan peternakan)
- e. Pembangunan/perbaikan infrastruktur tata kelola air (irigasi pertanian)
- f. Peningkatan kapasitas produksi bibit ikan BBIL Gunung Manau
- g. Revitalisasi dan Penguatan UPT Balai Benih dan Ternak
- h. Bantuan Alat pengolahan hasil perikanan
- i. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan
- j. Perluasan areal wilayah tanaman hortikultura dan pertanian dalam mendukung supply kebutuhan pangan pada Ibu Kota Negara (IKN)
- k. Meningkatkan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Unggulan
- l. Meningkatkan Promosi Pariwisata (Jaringan Paket Tour)

3. Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM. dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Revitalisasi Pasar
- b. Pemasaran hasil karet perkebunan berupa sheet asap
- c. Pengembangan Pasar Agro
- d. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi
- e. Teknis Yang Diperdagangkan Standard Indonesian Rubber (BOKAR-SIR)
- f. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dgn ritel modern dan sentra oleh-oleh untuk perluasan pemasaran produk UMKM
- g. Peningkatan fasilitasi dan digitalisasi pemasaran/marketing produk UMKM melalui marketplace Nasional dan luar negeri
- h. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM
- i. Pendampingan dan pelatihan UMKM lebih intens dan massif
- j. Mengaktifkan Forum Komunikasi Terkait Investasi/Penanaman Modal Agar Dapat Dikomunikasikan Dengan Cepat
- k. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan BLK

- l. Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Outsourcing) Untuk Penempatan Tenaga Kerja
 - m. Melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
 - n. Meningkatkan Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)
 - c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
 - d. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa (Balangan Pintar)
 - e. Meningkatkan pelaksanaan kejar paket A, B dan C
 - f. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan
 - g. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB
 - h. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)
 - i. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan)
 - j. Meningkatkan Optimalisasi Perpustakaan
 - k. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas dan RSUD)
 - l. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - m. Meningkatkan Pelayanan Homecare
 - n. Meningkatkan Pelayanan Prima RSUD dan Puskesmas
 - o. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
 - p. Menurunkan Angka Stunting (Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik)
 - q. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan
 - r. Memberikan Beasiswa Sekolah Kedokteran (Dokter dan Dokter Spesialis)
 - s. Mengembangkan Inovasi Kesehatan
 - t. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi untuk PUS usia 15-19 tahun
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Mempertahankan kualitas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Meningkatkan Penerapan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP)
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan
 - e. Penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi
 - f. Penguatan dan Peningkatan Kearsipan Daerah
6. Prioritas 6 : Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
 - b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 - c. Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan Secara Terpadu
 - d. Meningkatkan Pemutakhiran Data Kemiskinan
7. Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemberian Bantuan Sosial Kepada PPKS (disabilitas, lansia, yatim, dll)
 - b. Optimalisasi Inovasi Pelayanan PPKS
 - c. Meningkatkan pemberdayaan Ormas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan
 - d. Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah, TPA serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan Pembina seni baca al quran
 - e. Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
 - f. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian local
 - h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala

- i. Pelestarian cagar budaya
- j. Meningkatkan pelayanan respon cepat tim penanggulangan bencana daerah
- k. Optimalisasi mitigasi bencana dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan tingkat desa/kelurahan
- l. Optimalisasi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
- m. Optimalisasi Pelestarian Peninggalan Sejarah Daerah
- n. Peningkatan pembinaan ormas dan parpol serta unsur masyarakat dalam kehidupan demokrasi dalam mensukseskan agenda pemilu dan pemilihan tahun 2024
- o. Sinergitas pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024
- p. Aktualisasi dan optimalisasi peran Satpol PP sebagai salah satu unsur pengamaman dalam Pemilu dan Pemilihan serentak 2024
- q. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka pengelolaan APBDes yang efektif dan tepat sasaran
- r. Optimalisasi pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
- s. Peningkatan kapasitas SDM Desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan BUMDes
- t. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sumber daya untuk peningkatan PAD BUMDes

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan

Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Daerah, Inspektorat Kabupaten Balangan telah merumuskan tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN”** dengan indicator tujuan **“Indeks Integritas Kabupaten Balangan”** dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif
2. Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan

Sedangkan Indikator sasaran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Level maturitas SPIP
2. Level kapabilitas APIP
3. Indeks Integritas
4. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
5. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2024
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Indeks Integritas	80

dari KKN		
Sasaran :		
Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Level maturitas SPIP Level kapabilitas APIP Indeks Integritas Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Level 3 (3,1) Level 3 WBK 4 WBBM 4
Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	80%

3.3. Faktor yang menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Inspektorat merupakan Program kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan akan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Inspektorat dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang keberhasilan pencapaian Misi ke IV Kepala Daerah yang tertuang dalam Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Inspektorat sebagai salah satu SKPD yang mendukung pencapaian Misi ke IV Kepala daerah kabupaten Balangan yaitu” *Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara serta penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif* “. Untuk mendukung komitmen Bupati dan Wakil Bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan RPJMD diatas maka Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten berperan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip diantaranya adalah transparansi, responsif dan akuntabel. Untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap komponen masyarakat yang bersifat transparan, memiliki daya tanggap, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta efektif dan efisien.

Program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.2
Kegiatan Prioritas Pendukung Sasaran RKPD
Kabupaten Balangan Tahun 2024

Prioritas RKPD	Sub Prioritas	Indikator Kinerja SKPD	Indikator Kinerja Utama	Target	Program Prioritas	Penanggung Jawab
Meningkatkan Kualitas Dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat Dan Abdi Negara	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Level maturitas SPIP	Level 3 (3,1)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektur
			Level kapabilitas APIP	Level 3		
			Indeks Integritas	80		
			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	WBK 4 WBBM 4		
	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	80 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektur	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Balangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				17,737,509,911				16,783,187,202
6	INSPEKTORAT DAERAH				17,737,509,911				16,783,187,202
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	Inspektorat Kab. Balangan	73 (BB)	12,066,895,911	APBD		74 (BB)	13,273,585,502
		Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Kab. Balangan	100				100	
6	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	Inspektorat Kab. Balangan	100%	67,778,800.00	APBD		100%	74,556,680
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Balangan	2 Dokumen	2,495,000	APBD		2 Dokumen	2,744,500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kab. Balangan	4 Laporan	65,283,800	APBD		4 Laporan	71,812,180

6	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Inspektorat Kab. Balangan	100%	7,693,301,911	APBD	100%	8,462,632,102	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Inspektorat Kab. Balangan	44 orang/bulan	7,693,301,911	APBD	640 orang	8,462,632,102
6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Inspektorat Kab. Balangan	100%	1,873,014,100	APBD	100%	1,324,135,010
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Balangan	2 paket	119,059,100	APBD	2 paket	130,965,010
6	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Inspektorat Kab. Balangan	25 pegawai	669,255,000	APBD	25 pegawai	736,180,500
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kab. Balangan	30 pegawai	1,084,700,000	APBD	30 pegawai	1,193,170,000
6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	Inspektorat Kab. Balangan	100%	1,380,846,800	APBD	100%	1,241,959,510
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Balangan	4 paket	251,792,700	APBD	4 paket	276,971,970
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Balangan	12 paket	87,236,100	APBD	12 dokumen	95,959,710
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Balangan	120 Dokumen	47,192,000	APBD	120 dokumen	51,911,200
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Balangan	70 Laporan	994,626,000	APBD	70 Laporan	1,094,088,600
6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Inspektorat Kab. Balangan	12 Bulan	438,321,200	APBD	12 Bulan	482,153,320
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Balangan	12 Laporan	6,100,000	APBD	12 Laporan	6,710,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Kab. Balangan	12 Laporan	205,224,900	APBD	12 Laporan	225,747,390
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Balangan	12 Laporan	226,996,300	APBD	12 Laporan	249,695,930
6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	Inspektorat Kab. Balangan	12 Bulan	613,633,100	APBD	12 Bulan	674,996,410
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Inspektorat Kab. Balangan	36 unit	497,223,000	APBD	37 unit	546,945,300
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Dipelihara	Inspektorat Kab. Balangan	1 unit	116,410,100	APBD	1 unit	128,051,110

6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat Kab. Balangan	80%	3,548,247,000	APBD		82%	1,174,998,000
6	01	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	Inspektorat Kab. Balangan	33 SKPD	2,831,157,000	APBD		33 SKPD	3,114,272,700
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Balangan	33 Laporan	289,700,000	APBD	33 Laporan	318,670,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Balangan	10 Laporan	580,177,000	APBD	10 Laporan	638,194,700
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab. Balangan	2 Laporan	52,500,000	APBD	2 Laporan	57,750,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kab. Balangan	1 Laporan	62,190,000	APBD	1 Laporan	68,409,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Balangan	6 Laporan	1,494,990,000	APBD	6 Laporan	1,644,489,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab. Balangan	4 Dokumen	351,600,000	APBD	4 Dokumen	386,760,000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti	Inspektorat Kab. Balangan	75 rekomendasi	717,090,000	APBD	90 rekomendasi	788,799,000
					Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani		100%				100%	
					Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		Level 4 (4,0279)				Level 4 (4,1)	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Inspektorat Kab. Balangan	2 Laporan	42,990,000	APBD	2 Laporan	47,289,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Balangan	73 Laporan	674,100,000	APBD	73 Laporan	741,510,000

6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Inspektorat Kab. Balangan	- WBK : 4	2,122,367,000	APBD		- WBK :5	2,334,603,700	
					Level Maturitas SPIP		- WBBM : 4				- WBBM : 5		
					Indeks Integritas		Level 3 (3,1)				3 (3,2)		
					Level kapabilitas APIP		80				82		
							Level 3				3		
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	Inspektorat Kab. Balangan	WBK : 5	2,122,367,000	APBD		WBK : 6	2,334,603,700	
					Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti		75				80		
					Presentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi		100%				100		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Balangan	32 perangkat daerah	177,575,000	APBD		32 perangkat daerah	195,332,500
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Balangan	32 perangkat daerah	302,330,000	APBD		32 perangkat daerah	332,563,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab. Balangan	3 Kegiatan	1,082,523,000	APBD		3 Kegiatan	1,190,775,300
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Balangan	32 Perangkat Daerah	559,939,000	APBD		32 Perangkat Daerah	615,932,900

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Inspektorat pada tahun 2024, sehingga upaya Inspektorat dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran aparat Inspektorat kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan *guidance* di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan Visi organisasi.

Akhir kata semoga penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2023

Inspektur,



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730501 199311 1 001

